

Ækademika : Jurnal Pendidikan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2622-9293

KAPITALISME PENDIDIKAN ISLAM (Antara Kompetisi dan Keadilan)

Moh. Zaiful Rosyid

Institut Agama Islam Negeri Madura

zaifulrosyid@gmail.com

Abstrak:

The problems of Islamic education developing in schools today are so many, one of them is the Islamic education capitalism, education that is the right of every individual is limited by financial ability. the expensive cost of private education that incidentally is an Islamic educational institution that usually has the word Islam behind the name of the school such as Islamic elementary school, Islamic junior high school and the like that. it makes education has gone out of its true purpose. The Islamic education paradigm does not distinguish social stratification in the community, because learning is the right of every individual, everybody has the right to get education in school. It is time for us to implement the paradigm of "social justice", by using the "human empowerment approach". This approach places humans as humans. Humans are not adapted with goods. Humans are independent-autonomous creatures, have potentials that can be developed and realized. So this equitable education will be done when we all seriously transform education with the concept of "humanize human beings".

Keywords: Islamic education, human, school

Problematika pendidikan Islam yang berkembang di sekolah saat ini sangat banyak, salah satunya adalah kapitalisme pendidikan Islam, pendidikan yang merupakan hak dari setiap individu dibatasi oleh kemampuan secara finansial. Mahalnya biaya pendidikan di sekolah swasta yang notebene lembaga pendidikan Islam yang biasanya

Ākademika : Jurnal Pendidikan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2622-9293

memberikan imbuhan kata Islam dibelakang nama sekolahnya seperti SD Islam ataupun SMP Islam dan semacamnya, hal itu membuat pendidikan sudah keluar dari tujuan yang sebenarnya. Paradigma pendidikan Islam tidak membedakan stratifikasi sosial dimasyarakat, karena belajar merupakan hak setiap individu, sehingga siapapun berhak mendapatkan pendidikan di sekolah. Sudah saatnya kita menggunakan paradigma “kedilan sosial”, dengan menggunakan pendekatan “*pemberdayaan manusia*”. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai manusia. Manusia tidak disejajarkan dengan barang. Manusia merupakan makhluk otonom yang merdeka, mempunyai potensi-potensi yang dapat dikembangkan dan direalisasikan. Sehingga pendidikan yang berkeadilan ini akan terlaksana bilamana kita semua serius mentransformasikan pendidikan dengan konsep “memanusiakan manusia”.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, manusia, sekolah

Pendahuluan

Sesuai dengan sifatnya yang tidak pernah berakhir dari sisi proses (*never ending process*), pendidikan itu mempunyai banyak faset untuk ditelaah. Pendidikan memang muncul dalam berbagai bentuk dan paham. Menurut Paulo Freire *pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi manusia menjadi manusia agar terhindar dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan sampai kepada ketertinggalan.*¹ Pada dasarnya pendidikan memang diselenggarakan dalam rangka membebaskan manusia dari berbagai persoalan hidup.

Selain itu pendidikan banyak dipahami sebagai wahana untuk menyalurkan ilmu pengetahuan, alat pembentukan watak, alat mengasah

¹ Firdaus M. Yunus, *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005), hlm. 1.

Akademika : Jurnal Pendidikan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2622-9293

otak, serta media untuk meningkatkan ketrampilan kerja.² Sementara bagi paham lain, pendidikan lebih diyakini sebagai suatu media untuk menanamkan nilai-nilai moral dan ajaran keagamaan, alat meningkatkan taraf ekonomi, alat mengurangi kemiskinan, alat mengangkat status sosial, dan juga wahana untuk menciptakan keadilan sosial.

Melihat begitu pentingnya makna dari pendidikan bagi umat manusia, maka banyak peradaban manusia yang “mewajibkan” masyarakatnya untuk tetap menjaga keberlangsungan pendidikan. Sebagaimana peradaban kita sebagai umat Islam, yang selalu menanamkan kewajiban dalam menuntut ilmu, seperti “*tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri cina*” atau “*tuntutlah ilmu dari buaian ibu sampai liang lahat*”, sebagaimana sebuah hadist yang berbunyi:

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

“*Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seorang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan*”.

Begitupula dengan peradaban negara kita tercinta, Indonesia. Setiap tanggal 2 Mei di Seantero Nusantara, kita merayakan Hari Pendidikan Nasional, semua ini tidak lain adalah untuk mempertahankan dan menjaga keberlangsungan pendidikan di Indonesia, dan juga seakan-akan negara kita ingin menegaskan bahwa pendidikan benar-benar modal buat membangun dan mengembangkan negeri ini.

Apalagi dewasa ini, kita tengah memasuki suatu zaman baru yang ditandai dengan menguatnya paham pasar bebas, yang dikenal sebagai zaman globalisasi, maka tradisi umat manusia untuk mempertahankan eksistensi mereka melalui pendidikan mendapat tantangan, karena pendidikan sedang terancam dengan adanya sebagian manusia yang menyatakan bahwa dunia pendidikan dapat digunakan untuk mengakumulasi kapital dan mendapat keuntungan.

Sehingga di zaman globalisasi ini pendidikan pun mulai terkesan dengan “*mahalnya biaya sekolah*”. Bahkan program pemerintah wajib

² Francis Wahono, *Kapitalisme Pendidikan Antara Kompetisi dan keadilan* (Yogyakarta: Insist Press, 2001), hlm. 2.

Ākademika : Jurnal Pendidikan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2622-9293

belajar dua belas tahun itu hanya menjadi wacana saja di masyarakat, terlebih di daerah perkotaan. Beberapa sekolah sudah mematok uang pendaftaran dan uang gedung yang bernilai jutaan rupiah, belum lagi uang seragam dan lain-lain.

Seperti yang dilansir Republika bahwa praktik kapitalisme yang terjadi pada dunia pendidikan, dituding masih menjadi salah satu akar permasalahan yang menghambat kemajuan pendidikan di negeri ini. Salah satu persoalan di tengah maraknya praktik kapitalisme dalam dunia pendidikan adalah belum terpenuhinya upah serta jaminan kerja yang layak bagi seluruh tenaga pendidikan.³

Apa yang terjadi dengan kebijakan dan praktik pendidikan? Bagaimana seharusnya kita selaku pemerhati dan praktisi pendidikan menyikapi persoalan-persoalan pendidikan yang memunculkan kekecewaan tersebut? Tapi apa mau dikata, ternyata yang terlihat dilapangan sungguh berbeda, bahkan ironis. Kondisi dunia pendidikan kita amatlah memprihatinkan dan semakin jauh dari cita-cita yang idealnya, yaitu sebagai wahana pembebasan manusia dan memanusiakan manusia.

Definisi Kapitalisme

Secara etimologis, kapitalisme berasal dari bahasa latin “*Caput*” (kata benda) dan “*Capitalis*” (kata sifat) yang berarti “kepala” atau “yang berkaitan dengan kepala”. Dalam kaitan dengan kata ini, kapitalisme berarti *usaha untuk mempertahankan kepala, kehidupan, dan kesejahteraan*.⁴ Secara terminologis, kapitalisme dipakai untuk menamai sistem ekonomi yang mendominasi dunia Barat sejak runtuhnya feodalisme.

Sebagai sebuah sistem, kapitalisme terkait dengan hubungan antara pemilik pribadi atas alat produksi seperti tanah dan instalasi industri, yang secara keseluruhan disebut modal atau kapital dan para pekerja yang tidak

³<https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/19/05/02/pqts2y291-pemerintah-didesak-hapuskan-kapitalisme-pendidikan>, (Diakses 11 Juli 2019, Pukul: 13:00 WIB).

⁴ Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 52.

Akademika : Jurnal Pendidikan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2622-9293

mempunyai modal. Max Weber (1867-1920), peletak dasar sosiologi modern dalam bukunya *The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism* mendefinisikan “kapitalisme sebagai hadirnya industri bagi kebutuhan kelompok manusia yang dilaksanakan dengan metode perusahaan yang dikelola secara rasional”,⁵ seperti adanya neraca modal. Weber menggunakan semangat kapitalisme untuk menggambarkan sikap mental yang selalu berusaha mencari keuntungan secara rasional dan sistematis.

Weber menganggap bahwa kapitalisme ialah sebagai sebuah sistem kegiatan ekonomi yang dituju pada suatu pasar dan juga yang dipacu untuk menghasilkan laba dengan adanya pertukaran pasar. Dengan sistem ekonomi politik yang di dalamnya terdapat industri, perdangan serta alat produksi lain yang hanya terfokus terhadap pemilik modal yang bertujuan mendapatkan keuntungan yang besar.

Kapitalisme sebagai sistem baru telah berkembang sejak zaman kuno, dan selalu mengalami masa kemajuan dan masa kemerosotan. Karena kapitalisme merupakan suatu sistem yang terus mengalami perkembangan dalam upaya eksistensi dirinya, kapitalisme mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda pada setiap zamannya. Secara umum ciri-ciri kapitalisme dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kapitalisme klasik dan kapitalisme modern.

Nicholas Abercrombi (dosen sosiologi University of Lancaster) mengemukakan ciri-ciri kapitalisme dalam bentuknya yang murni sebagai berikut: 1. Pemilikan dan kontrol atas instrument produksi, 2. Kegiatan ekonomi diarahkan bagi pembentukan laba (profit), 3. Tersedianya sistem pasar yang mengatur semua kegiatan, 4. Perolehan laba oleh pemilik modal, dan 5. Penyediaan tenaga kerja oleh buruh yang bertindak sebagai agen bebas.

Adapun ciri kapitalisme modern menurut Meghnad Desai (guru besar London School of Economics) adalah: 1. Produk untuk dijual, bukan untuk dikonsumsi sendiri, 2. Pasar, tempat tenaga kerja dibeli dan dijual dengan alat tukar upah melalui hubungan kontrak, 3. Uang, yang digunakan dalam tukar

⁵ Ibid., hlm. 53.

Ākademika : Jurnal Pendidikan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2622-9293

menekar, 4. Proses produksi atau proses kerja, 5. Pengambilan keputusan di tangan pemilik modal, 6. Persaingan bebas di antara pemilik kapital.

Potret Kapitalisme di Sekolah dan Perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.⁶ Pendidikan yang hanya dipandang sebagai usaha dalam transfer ilmu dan dan transfer nilai menjadi anugerah tersendiri dalam mencapai perubahan diri seseorang.

Namun, dengan bertahan dan semakin berkembangnya kapitalisme, ternyata kapitalisme tidak hanya berkembang di dunia industri dan perusahaan, melainkan perkembangan kapitalisme juga sudah mulai berkembang di dunia pendidikan. Masuk dan berkembangnya kapitalisme di dunia pendidikan ditandai dengan semakin maraknya pembangunan sekolah-sekolah swasta yang notabene merupakan lembaga pendidikan Islam dengan memberlakukan perilaku pasar bebas dan dunia bisnis di dunia pendidikan (sekolah).

Maraknya pasar bebas didunia pendidikan, dilandasi pada suatu ideologi yang berangkat dari kepercayaan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dapat dicapai sebagai hasil normal dari “kompetisi bebas”.⁷ Kompetisi Pasar Bebas merupakan suatu kompetisi yang agresif akibat dari terjaganya mekanisme pasar bebas. Kesemua keyakinan ini berangkat dari suatu pendirian bahwa “pasar bebas” itu efisien, dan pasar bebas diyakini sebagai cara yang tepat untuk mengalokasikan sumber daya alam yang langka, demi untuk memenuhi kebutuhan manusia.

⁶ <http://blog.unnes.ac.id/efvinurhidayah/2017/12/03/kapitalisme-dalam-dunia-pendidikan-di-indonesia>, (Diakses 11 Juli 2019, Pukul: 13:00 WIB).

⁷ Francis Wahono, *Kapitalisme Pendidikan Antara Kompetisi dan Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 2.

Ākademika : Jurnal Pendidikan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2622-9293

Pasar bebas dan bisnis yang berlaku di sekolah-sekolah semakin berkembang pesat, dengan banyaknya program baru yang semakin menekan dan melumpuhkan orang tua sebagai wali murid dalam membiayai sekolah anaknya.

Program sekolah itu berupa seperti adanya pengadaan kaos olah raga, *study tour*, daftar ulang, perubahan warna baju seragam sekolah setiap tahunnya, gantinya terbitan buku pelajaran setiap semester dan lain sebagainya, yang semua itu dikoordinir oleh pihak sekolah.⁸

Program tersebut dilandasi atas alasan untuk meningkatkan kualitas anak didik dan untuk mempermudah jalannya sitem pendidikan di sekolah, tapi dibalik itu semua terdapat adanya dunia bisnis, dimana seorang guru dan lembaga berfungsi sebagai birokrasi perusahaan dengan mendapatkan keuntungan yang besar.

Semua praktisi bisnis di sekolah itu berjalan lancar karena kolusi antara pengusaha (industri wisata, penerbitan, tekstil, asuransi, sepatu dan lain sebagainya) dengan penguasa maupun pelaksana pendidikan,⁹ yang mana pastinya mereka mendapat keuntungan yang sangat besar dari praktisi bisnis tersebut.

Lain halnya dengan masyarakat yang menjadi korban, dengan adanya program-program tersebut, mereka semakin terlumpuhkan dan tertekan dengan biaya sekolah. Sehingga mereka selalu dihantui rasa takut dengan biaya sekolah yang mahal dan keputus-asaan dalam menuntut ilmu.

Dengan adanya buku pelajaran yang selalu berganti setiap tahunnya atau terkadang setiap semester, maka buku-buku tersebut tidak dapat diwariskan kepada adiknya atau tetangga yang membutuhkan, begitupula dengan seragam sekolah. Padahal jika tidak ada beberapa program tersebut, para orang tua dapat menghemat biaya pendidikan, dan dapat menyekolahkan anaknya sampai selesai sehingga akan semakin berkurang data anak yang putus sekolah (*drop-out*).

⁸ Darmaningtyas, *Pendidikan yang Memiskinkan* (Yogyakarta: Galang Press, 2004), hlm. 229.

⁹ Ibid., hlm. 250.

Ākademika : Jurnal Pendidikan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2622-9293

Dari beberapa program sekolah diatas, betapa program sekolah telah turut menyumbang terjadinya proses “*Pemiskinan*” dan “*Pembodohan*” di masyarakat, karena semakin banyaknya anak didik yang tidak dapat menyelesaikan program studinya sampai selesai, dikarenakan biaya sekolah yang mahal dan hanya dapat dijangkau oleh mereka yang ekonominya mapan.

Padahal sejatinya setiap individu memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran tanpa dibedakan stratifikasi sosialnya, apakah ia berada pada kelas bawah (*under class*), kelas menengah (*midle class*), ataupun kelas atas (*high class*). Setiap individu mempunyai hak otonomi untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya melalui bidang pendidikan. Sebagaimana diungkapkan Brian Crittenden dalam *Educational for Rational Understanding: Philosophical Prospectives on The Sty and Practice of Education*, bahwa otonomi individu merupakan nilai yang amat fundamental dalam teori dan praktik pendidikan.¹⁰

Penyebab Kapitalisme dan Komersialisme dalam Pendidikan

1. Kesalahan Paradigma dan Pendekatan

Berkembangnya kapitalisme pendidikan di sekolah adalah dampak dari zaman globalisasi dan juga dampak dari kesalahan Paradigma dan Pendekatan. Kesalahan ini merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda dan oleh pemerintah orde baru sampai kini masih dilanjutkan tanpa sadar.

Kesalahan paradigma tersebut adalah menanamkan paradima “*kompetisi*” dalam pendidikan, dan bukan paradigma “*keadilan sosial*” yang seharusnya ditanamkan pada masyarakat. Sekilas paradigma itu adalah wajar-wajar saja, tetapi begitu diteliti lebih jeli, kompetisi dalam orde baru adalah

¹⁰ Brian Crittenden, *Educational for Rational Understanding: Philosophical Prospectives on The Sty and Practice of Education* (Victoria: Australian Council for Educational Research, 1981), hlm. 99.

Akademika : Jurnal Pendidikan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2622-9293

kamufilase dari mempertahankan status-quo ekonomi-sosial yang sangat timpang.¹¹

Sebagai contohnya adalah pembedaan alokasi subsidi yang bias pada sekolah-sekolah negeri top dan di ibu kota yang meng-anaktirikan sekolah-sekolah negeri bawahan dan jauh dari pusat, atau di kabupaten pelosok tanah air. Contoh lain adalah pembedaan perlakuan antara sekolah-sekolah yang dikelola oleh Negara dan sekolah-sekolah yang dikelola oleh swasta. Biasanya yang dikelola oleh Negara adalah anak emas dan yang dikelola oleh swasta adalah anak tiri. Pembedaan ini adalah pembedaan sistematis, artinya untuk maksud tujuan politik ekonomi tertentu.

Paradigma “kompetisi” lebih mengimplikasikan pendekatan kapitalis liberalis-di Indonesia ditambah dengan ajektif “feodal”-“sumber daya manusia”.¹² Pendekatan “sumber daya manusia” mengandaikan investasi dalam bentuk uang maupun tenaga kerja, dimana manusia disama-ratakan dengan barang. Pendekatan ini dibesarkan oleh pemikir ekonom klasik mengenai “pertumbuhan ekonomi”.

2. Beratnya Tanggungan dan Seriusnya Ketimpangan Ekonomi Sosial Bangsa

Dari kesalahan paradigma dan pendekatan yang menyebabkan adanya pembedaan dan perhatian pemerintah dalam hal alokasi subsidi antara sekolah negeri dan sekolah swasta, membuat sekolah-sekolah swasta kekurangan dana dalam pengembangan pendidikan, khususnya menghadapi zaman globalisasi ini.

Maka dalam melengkapi fasilitas sekolah agar tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan, dan untuk menggaji para guru, pihak sekolah menarik uang SPP yang tidak sedikit dan lebih mahal dari sekolah negeri, selain itu juga masih ada dana potongan yang dibebankan kepada orang tua

¹¹ Francis Wahono, *Kapitalisme Pendidikan Antara Kompetisi dan Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 86.

¹² *Ibid.*, hlm. 89.

Ākademika : Jurnal Pendidikan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2622-9293

murid, seperti biaya ujian, uang rapor, uang ijazah, perayaan hari besar, uang UKS, OSIS, dan lain sebagainya.¹³

Beratnya tanggungan ekonomi sosial pendidikan ini mengakibatkan ketimpangan ekonomi sosial bagi guru/dosen di satu pihak, tetapi juga bagi peserta didik dan keluarganya di lain pihak, sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat penyelesaian atau pelulusan peserta didik, yakni sepertiga dari jumlah pendaftar. Dengan kata lain *drop-out* atau putus sekolah sebelum waktunya merupakan dampak dari beratnya tanggungan dan ketimpangan ekonomi sosial, sehingga semakin banyak anak didik yang tidak mendapatkan hak-hak mereka dalam dunia pendidikan.

Tata Pendidikan yang Berkeadilan Sosial

Pendidikan adalah kebutuhan dasar (*basic need*) hidup manusia.¹⁴ Pendidikan juga merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia, tapi kenyataan yang terjadi pendidikan dan pengajaran di dalam paradigma neokolonial Indonesia selama ini hanya diajukan demi fungsinya terhadap kebutuhan penguasa, tidak demi masyarakat.

Dari data UNICEF tahun 2016, masih terdapat 2,5 juta anak kategori usia Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak dapat mengakses pendidikan tingkat lanjutan. Sedangkan di kategori pendidikan tinggi, dari pengakuan Direktur Kelembagaan Kemenristekdikti, angka partisipasi kasar untuk Perguruan Tinggi di tahun 2017 hanya berkisar 31 persen. Hal ini menandakan masih ada 69 persen jumlah angkatan pendidikan usia 19 sampai 23 tahun yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Inilah wajah ketimpangan pendidikan kita di bawah kapitalisme.¹⁵

Paradigma pendidikan mestinya menjadi orientasi kepemimpinan nasional. Sehingga pendidikan demokrasi dan demokratisasi pendidikan di

¹³ Ade Irawan, dkk, *Mendagangkan Sekolah* (Jakarta: Yayasan Tifa, 2004), hlm. 96.

¹⁴ Firdaus M. Yunus, *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005), hlm 7.

¹⁵ <https://www.militanindonesia.org/berita/lain-lain/8724-pendidikan-indonesia-di-bawah-kuasa-kapitalisme.html>, (Diakses 11 Juli 2019, Pukul: 13:00 WIB).

Akademika : Jurnal Pendidikan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2622-9293

Indonesia bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Masdar F. Mas'udi, tidak saja berhenti pada bentuknya yang bersifat *formal-prosedural* melainkan dilanjutkan pada level *material-substansial*.

Maka sudah saatnya kita merubah paradigma pendidikan yang selama ini keliru. Paradigma pendidikan yang seharusnya ditanamkan adalah paradigma “keadilan sosial”, yang direkomendasi oleh Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 27. yang pertama menjadikan “ikut mencerdaskan kehidupan bangsa”, yang kedua menjamin “hak memperoleh pendidikan untuk semua”.¹⁶

Paradigma “kedilan sosial” menuntut dijadikannya dasar membangun sistem persekolahan maupun pendidikan masyarakat luas usaha-usaha secara preferensial untuk mensubsidi peserta didik yang tertinggal secara ekonomi sosial. Subsidi tidak hanya berupa materi termasuk uang, tetapi berupa juga pendampingan ekstra. Maksudnya, agar beban ekonomi sosial tidak menjadi kendala untuk mengembangkan kepandaian otak dan keluhuran watak.

Dalam paradigma “Kompetisi”, menggunakan pendekatan “*sumber daya manusia*”. Lain halnya dengan paradigma “kedilan sosial”, menggunakan pendekatan “*pemberdayaan manusia*”. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai manusia. Manusia tidak disejajarkan dengan barang. Manusia merupakan makhluk otonom yang merdeka, mempunyai potensi-potensi yang dapat dikembangkan dan direalisasikan.

Mekanisme paradigma “keadilan sosial” adalah “penetasan kemakmuran”. Argumentasinya asal ada pertumbuhan, perataan, atau distribusi berjalan dengan sendirinya. Pendidikan yang berkeadilan ini akan terlaksana bilamana kita semua serius mentransformasikan pendidikan menuju ke pendidikan yang menempatkan manusia sebagai manusia.¹⁷

Jika paradigma ini terlaksana, maka tidak akan ada lagi beratnya tanggungan dalam dunia pendidikan dan ketimpangan ekonomi sosial bangsa. Dengan paradigma “keadilan sosial” semua anak didik akan

¹⁶ Francis Wahono, *Kapitalisme Pendidikan Antara Kompetisi dan Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 87.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 107.

Ākademika : Jurnal Pendidikan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2622-9293

mendapatkan haknya dalam menuntut ilmu, dan kemungkinan besar akan terjadinya pengurangan jumlah anak didik yang putus sekolah.

Selain itu para pendidik atau guru juga akan mendapatkan kesejahteraan yang semestinya dan yang memang sudah seharusnya mereka terima sebagai para pendidik. Sebagaimana pernyataan KH. Syukri Zarkasyi bahwa agar pendidikan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tetap *survive* khususnya di zaman globalisasi ini maka kesejahteraan guru harus sangat diperhatikan.¹⁸ Mengingat mereka adalah orang-orang yang mencerdaskan kaderisasi bangsa.

Dengan adanya paradigma keadilan dalam dunia pendidikan, baik dalam hal subsidi antara sekolah negeri dan sekolah swasta, diharapkan tidak ada lagi kesan “sekolah mahal” dan sekolah hanya dapat dijangkau oleh mereka yang berekonomi tinggi, tapi semua manusia dapat mendapatkan haknya dalam dunia pendidikan.

Penutup

Pendidikan adalah wahana untuk menyalurkan ilmu pengetahuan, alat pembentukan watak, alat mengasah otak, serta media untuk meningkatkan ketrampilan kerja. Pendidikan juga diyakini sebagai suatu media untuk menanamkan nilai-nilai moral dan ajaran keagamaan, alat meningkatkan taraf ekonomi, alat mengurangi kemiskinan, alat mengangkat status sosial, dan juga wahana untuk menciptakan keadilan sosial.

Akan tetapi dalam praktik pendidikan selama ini bukannya mencerdaskan, malah sebaliknya, pendidikan dijadikan arena pembodohan saja, dan sumbangan dalam program meningkatkan pemiskinan masyarakat. Lebih tepat lagi pendidikan justru menjadi belenggu tersendiri bagi masyarakat.

Semua hal tersebut karena paradigma yang salah selama orde baru, yaitu paradigma “kompetisi” dengan pendekatan “Sumber Daya Manusia”. Dalam paradigma ini, dunia pendidikan lebih mempertahankan *status-quo* ekonomi-sosial yang sangat timpang.

¹⁸ Syukri Zarkasyi, “Pengembangan Pendidikan Pondok Pesantren di Era Otonomi Pendidikan: Pengalaman Pondok Modern Darussalam Gontor”, (disertasi: UIN Syarif Hidayatullah, 2005), hlm. 29.

Ākademika : Jurnal Pendidikan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2622-9293

Paradigma “Kompetisi” mengakibatkan mahalannya sekolah, karena ketidakadilan pemerintah dalam pemberian subsidi antara sekolah negeri dan sekolah swasta, sehingga menyebabkan rendahnya gaji guru.

Maka tidak heran ketika kapitalisme berkembang di dunia pendidikan. Para pelaku pendidikan juga turut memiliki otak komersil dan turut mengembangkan pasar bebas di sekolah mereka. Hal ini mereka lakukan demi menjaga mutu sekolah dan mempertahankan biaya hidup mereka, karena berlakunya pasar bebas di dunia pendidikan membawa keuntungan yang besar bagi mereka.

Maka paradigma yang seharusnya ditanamkan adalah “keadilan sosial”, dengan harapan agar tercapainya tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Dengan paradigma keadilan sosial diharapkan akan adanya pemerataan dalam dunia pendidikan, sehingga semua anak bisa mendapatkan haknya dalam dunia pendidikan. Dengan demikian visi sosial dalam pendidikan akan terkedepankan, dan bukan visi ekonominya.

Daftar Pustaka

Armando, Nina M., *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

Crittenden, Brian. *Educational for Rational Understanding: Philosophical Prospectives on The Sty and Practice of Education*. Victoria: Australian Council for Educational Research, 1981.

Darmaningtyas, *Pendidikan yang Memiskinkan*. Yogyakarta: Galang Press, 2004.

<http://blog.unnes.ac.id/efvinurhidayah/2017/12/03/kapitalisme-dalam-dunia-pendidikan-di-indonesia>, (Diakses 11 Juli 2019, Pukul: 13:00 WIB).

<https://www.militanindonesia.org/berita/lain-lain/8724-pendidikan-indonesia-di-bawah-kuasa-kapitalisme.html>, (Diakses 11 Juli 2019, Pukul: 13:00 WIB).

<https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/19/05/02/pqts2y291-pemerintah-didesak-hapuskan-kapitalisme-pendidikan>, (Diakses 11 Juli 2019, Pukul: 13:00 WIB)

Irawan, Ade, dkk, *Mendagangkan Sekolah*. Jakarta: Yayasan Tifa, 2004.

Akademika : Jurnal Pendidikan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2622-9293

Syukri Zarkasyi,” Pengembangan Pendidikan Pondok Pesantren di Era Otonomi Pendidikan: Pengalaman Pondok Modern Darusslam Gontor”, disertasi: UIN Syarif Hidayatullah, 2005.

Wahono, Francis. *Kapitalisme Pendidikan Antara Kompetisi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Yunus, Firdaus M., *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005.